

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL DI GAMPONG LAMPINEUNG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

Hermansyah¹, Riantofani^{2*}, Onal Syafrizal³

^{1,2,3}Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda

hermansyah89@gmail.com, riantaufani@gmail.com, onalsyafrizalshmh@gmail.com

ABSTRACT

In development, community participation is one of the elements of the village development process, thus community participation in development needs to be increased first by other parties such as village officials. Basically, to mobilize village community participation is an important thing in the development of a village. Problem Formulation (1) How is community participation in infrastructure development in Lampineung Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency? (2) How is community participation in religious development in Lampineung Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency?. By using a qualitative approach research method. The results of this study indicate that community participation in infrastructure development planning in Lampineung Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency tends to vary. Community participation in the implementation of infrastructure development in Lampineung Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency shows a lower level than expected. Community participation in religious development planning in Lampineung Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency shows a very satisfactory level. Community participation in the implementation of religious development in Gampong Lampineung, Baitussalam District, Aceh Besar Regency is very good.

Keywords: Participation, Community, Social Development

ABSTRAK

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan gampong, dengan demikian partisipasi masyarakat pada pembangunan perlu ditingkatkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti aparat gampong. Pada dasarnya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat gampong merupakan hal penting dalam pembangunan suatu gampong. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang infrastruktur di Gampong Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar? (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang keagamaan di Gampong Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yang cenderung bervariasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari harapan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan keagamaan di Gampong Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar menunjukkan tingkat yang sangat memuaskan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan keagamaan di Gampong Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sangat baik

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Sosial

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menuju keadaan yang lebih baik. Dengan mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan.

Demikian halnya dengan pembangunan *gampong* dan masyarakat adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di *gampong* dan dalam berkehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat *gampong* agar dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa didunia ini. Pembangunan sarana dan prasarana *gampong* sangat berkaitan erat dengan pembangunan *gampong*, begitu juga dengan halnya pada *gampong* Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Karena ketersediaan sarana dan prasarana *gampong* akan sangat berhubungan dengan proses produksi, konsumsi dan distribusi ekonomi masyarakat yang kesemuanya ini tentu memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang agar terciptanya pembangunan sarana dan prasarana benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan. Namun, dalam penelitian ini peneliti akan membatasi ruang lingkup pembangunan dalam bidang infrastruktur dan keagamaan.

Adapun tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Conyers, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. (2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut, dan akan memiliki rasa memiliki terhadap proyek tersebut. (3) Partisipasi menjadi urgent karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan sdaran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang memnposisi masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat sendiri serta melibatkan masyarakat secara aktif. Pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di *gampong*. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah suatu hal yang penting dimana masyarakat tersebut yang paling mengetahui atau mempelajari apa yang terbaik untuk lingkungan mereka.

Merujuk pada uraian pembangunan partisipatif tersebut, terlihat bahwasanya masyarakat menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Artinya partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut, sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat sangatlah penting.

Indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di *Gampong* Lampineung

terlihat pada kegiatan rapat rutin, dimana terdapat kehadiran masyarakat rendah. Ada beberapa yang peneliti temukan dilapangan yang menjadi identifikasi masalah antara lain : Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, Masyarakat tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan partisipatif dan Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu,

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang infrastruktur di *Gampong* Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang keagamaan di *Gampong* Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang infrastruktur di *Gampong* Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang keagamaan di *Gampong* Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Slamet (2014: 7) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik

Adi Isbandi Rukminto (2017: 27) berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berkaitan dengan judul penulis yaitu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial Bintoro Tjokoromidjojo (2015, 83) menjelaskan bahwa:

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Ini bisa berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berdistribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. (Adisasmita, 2016: 34).

Adapun ruang lingkup yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut Totok Mardikanto (2012: 81-82) meliputi:

Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Pelaksanaan kegiatan, Pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

2. Teori Pembangunan Sosial

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju itu kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Konsep Pembangunan (*development*) yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Pembangunan juga telah menjadi semboyan dan daya tarik dalam lingkungan olahraga di seluruh dunia. Hartmann, D., & Kwauk, C. (2011:284-305) Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konseptual dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan dalam hal pembangunan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social capital*) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian *natural capital* juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan

keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (*moral hazard*) yang dipenuhi kepentingan tertentu (*vested interest*) dari keuntungan semata (*rentseeking*).

Pembangunan yang ideal dan berkelanjutan jika didasarkan pada basis kekuatan dan kemampuan rakyat. Tanpa basis kekuatan dan kemampuan rakyat, mustahil hasil pembangunan berefek jangka panjang. Menurut Noor Isran (2013:26) "kurangnya dukungan kekuatan dan kemampuan rakyat dalam proses pembangunan, maka pembangunan akan terjebak dalam kegagalan (*failed trap*)". Dalam konteks ini perlu diformulasikan apa sesungguhnya makna pembangunan. Jika mencoba memformulasikan, pembangunan dapat diartikan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang manusiawi, bermartabat, dan mandiri.

Pengertian pembangunan sering juga dapat diartikan sebagai proses transformasi (Noor Isran, 2013:26). Transformasi yang dimaksud melalui tiga tema pembangunan. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah, hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa

saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, proses tersebut bukan saja dalam domain fisik tapi juga proses domain mental spiritual. Artinya, pembangunan menyuguhkan perubahan yang memberikan utilitas baik fisik maupun mental bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian pembangunan jangan sampai mengorbankan mayoritas rakyat. Siagian (Noor Isran,2013:70) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa “(*nationbuilding*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (Noor Isran 2013: 84) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju

sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2014:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13)

Edi Suharto (2017: 38) mengartikan Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan

meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sosial adalah suatu konsep perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan untuk melengkapi pembangunan ekonomi Madgley (2015: 25). Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan. Pembangunan sosial tidak hanya terfokus pada kemajuan aspek ekonomi. Konsep ini berasal dari kritik terhadap pembangunan yang terfokus pada kemajuan ekonomi dan tidak memperhatikan aspek sosial.

Madgley (2015: 38-41) mengemukakan ada delapan aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sosial, diantaranya :

- a) Proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi. Aspek ini yang membuat pembangunan sosial berbeda ketika dibandingkan dengan pendekatan lain dalam mengangkat kesejahteraan orang banyak. Pembangunan sosial mencoba untuk mengaplikasikan kebijakan-kebijakan dan program-program sosial untuk mengangkat kesejahteraan sosial, pembangunan sosial melakukannya dengan konteks proses pembangunan.
- b) Pembangunan sosial mempunyai fokus berbagai macam disiplin ilmu (interdisipliner) berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Pembangunan sosial secara khusus terinspirasi dari politik dan ekonomi. Pembangunan sosial juga menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologi secara eksplisit. Dengan isu-isu ideologis,

pembangunan sosial diharapkan dapat lebih baik menciptakan intervensi dalam menganalisa dan menghadapi masalah sosial dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat.

- c) Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses. Pembangunan sosial sebagai konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit dimana istilah pembangunan itu sendiri lebih berkonotasi pada semangat akan perubahan yang positif. Secara literal, pembangunan adalah satu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial memiliki tiga aspek, *pertama*, kondisi sosial awal yang akan diubah dengan pembangunan sosial, *kedua*, proses perubahan itu sendiri, *ketiga*, keadaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.
- d) Proses perubahan yang progresif. Perubahan yang dilakukan berusaha untuk perbaikan bagi seluruh manusia. Ide-ide akan perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan sosial.
- e) Proses pembangunan sosial bersifat intervensi. Peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.
- f) Tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menghubungkan intervensi sosial dengan usaha pembangunan ekonomi. Keduanya didasari oleh keyakinan dan ideologi

yang berbeda tetapi hal ini dapat diharmonisasikan meskipun masih ditemui kesulitan untuk merangkum semuanya dalam sebuah sintesa.

- g) Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh serta ruang lingkungannya lebih bersifat inklusif atau universal. Pembangunan sosial fokus makronya menargetkan perhatian pada komunitas, daerah dan masyarakat. Pembangunan sosial lebih tertuju pada mereka yang terlantar karena pertumbuhan ekonomi atau tidak diikutsertakan dalam pembangunan (orang miskin dalam kota, penduduk desa yang miskin, etnis minoritas dan wanita). Pembangunan sosial fokusnya bersifat pembagian daerah (spasial) seperti dalam kota, masyarakat pedesaan, perkotaan, daerah-daerah atau negara.
- h) Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Midgley disini berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah.

3. Teori Organisasi

Secara harfiah, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*organon*" yang berarti alat bantu atau *instrument*. Dilihat dari asal katanya, maka organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu, organisasi dapat dikatakan suatu wadah kegiatan dari pada orang-orang yang berkerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan.

Menurut Lubis (2017: 13) organisasi adalah "sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat maupun diraba, tetapi selalu kita rasakan eksistensinya, hampir dalam semua aspek kehidupan, sebagai warga

negara misalnya, kita rasakan adanya berbagai peraturan, seperti keharusan memiliki kartu penduduk, kewajiban membayar pajak, dan aturan lainnya, yang menunjukkan adanya organisasi yang melingkupi dan mengatur perikehidupan kita walaupun kita sendiri tidak dapat melihat ataupun meraba organisasi yang mengeluarkan berbagai peraturan tersebut".

Kemudian menurut Hamalik (2019: 10) organisasi adalah "sebagai suatu kelompok yang mempunyai tujuan tertentu, secara mutlak akan dipengaruhi oleh perilaku perilaku, baik dari internal organisasi tersebut atau dari pihak eksternal". Kemudian menurut Robbins dikutip oleh Sopiah dalam Hamalik (2019: 11) bahwa organisasi adalah "satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinyu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama".

Pengertian Organisasi menurut Weber dalam Thoha (2012: 113) bahwa: "Organisasi merupakan suatu batasan batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri, mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu". Lebih lanjut Weber dalam Djatmiko (2015: 7) memberikan elemen-elemen yang terdapat dalam definisi organisasi, yaitu:

- 1) Organisasi mengandung hubungan sosial yaitu hubungan antara individu di dalam organisasi.
- 2) Organisasi memiliki batas-batas, yaitu syarat-syarat keanggotaan organisasi.
- 3) Organisasi mengandung hirarki dan otoritas serta pembagian kerja.
- 4) Interaksi dalam organisasi lebih bersifat asosiatif dari pada bersifat *communal*.

- 5) Secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan yang bertujuan sejalan dengan tujuan organisasi.
- 6) Berfokus pada pola interaksi hukum antara anggota yang bersifat mengikat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Prinsip-prinsip organisasi sering disebut dengan azas-azas organisasi. Prinsip atau azas merupakan dasar, pondasi, atau suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Prinsip-prinsip organisasi adalah pondasi yang menjadi pokok dasar atau yang menjadi pangkal-tolak di dalam menggerakkan organisasi. Oleh karena itu, organisasi dibangun dan digerakkan di atas pondasi yang berupa prinsip organisasi, dan setiap prinsip mengandung suatu kebenaran, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip organisasi.

Dari pendapat diatas, prinsip-prinsip organisasi yang digunakan sebagai sumber organisasi untuk membangun dan menggerakkan organisasi yang kompleks diharapkan dapat berjalan dengan baik dimana tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tergantung kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip organisasi.

C. METODE PENELITIAN

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format *grounded research*. “Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 2018: 89)”. Menurut Bogdan dan Taylor dalam

Moleong (2014: 4) mengemukakan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai dan tepat. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Metode ini merupakan suatu metode atau cara yang dimaksudkan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dengan lebih banyak dituangkan kedalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan data dokumentasi.

Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi yang peneliti buat, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti.

Untuk mendapatkan data sebagaimana dalam rumusan masalah, maka peneliti melakukan penelitian di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang infrastruktur di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar tingkat partisipasi

masyarakat cenderung bervariasi. Masyarakat *Gampong* Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar tidak semua hadir dalam musrembang, masyarakat yang hadir tidak semua bersuara memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur. hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tingkat pemahaman terhadap proses perencanaan, keterbatasan waktu, dan keterlibatan yang lebih mendalam dari sejumlah warga mungkin menjadi kendala utama dalam mencapai partisipasi yang lebih baik.

Slamet (2014: 7) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik

Adi Isbandi Rukminto (2017: 27) berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang

tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Konsepsi Pembangunan (*development*) yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Pembangunan juga telah menjadi semboyan dan daya tarik dalam lingkungan olahraga di seluruh dunia. Hartmann, D., & Kwauk, C. (2011:284-305) Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konseptual dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan dalam hal pembangunan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga social (*socialcapital*) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari

semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (*moral hazard*) yang dipenuhi kepentingan tertentu (*vested interest*) dari keuntungan semata (*rentseeking*).

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar bahwa tingkat partisipasi masyarakat lebih rendah dari yang diharapkan. Meskipun ada upaya untuk mengundang partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek dan pengumpulan umpan balik, sebagian besar warga cenderung bersikap pasif. Beberapa alasan yang mungkin melatarbelakangi hal ini termasuk kurangnya pengetahuan teknis terkait infrastruktur, ketidakpercayaan terhadap proses pembangunan yang berjalan, serta persepsi bahwa kontribusi mereka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir proyek.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial Bintoro Tjokoromidjojo (2015, 83) menjelaskan bahwa:

- d. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Ini bisa berupa

sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.

- f. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berdistribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. (Adisasmita, 2016: 34).

Pembangunan yang ideal dan berkelanjutan jika didasarkan pada basis kekuatan dan kemampuan rakyat. Tanpa basis kekuatan dan kemampuan rakyat, mustahil hasil pembangunan berefek jangka panjang. Menurut Noor Isran (2013:26) "kurangnya dukungan kekuatan dan kemampuan rakyat dalam proses pembangunan, maka pembangunan akan terjebak dalam kegagalan (*failed trap*)". Dalam konteks ini perlu diformulasikan apa sesungguhnya makna pembangunan. Jika mencoba memformulasikan, pembangunan dapat diartikan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang manusiawi, bermartabat, dan mandiri.

Pengertian pembangunan sering juga dapat diartikan sebagai proses transformasi (Noor Isran, 2013:26). Transformasi yang dimaksud melalui tiga tema pembangunan. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah, hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, proses tersebut bukan saja dalam domain fisik tapi juga proses domain mental spiritual. Artinya, pembangunan menyuguhkan perubahan yang memberikan utilitas baik fisik maupun mental

bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian pembangunan jangan sampai mengorbankan mayoritas rakyat. Siagian (Noor Isran, 2013:70) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa “(nationbuilding)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (Noor Isran 2013: 84) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang keagamaan di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan keagamaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan keagamaan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan keagamaan di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sangat memuaskan. Perangkat *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar turut berperan dalam menggalang partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, proses perencanaan dapat dianggap inklusif dan responsif terhadap

kebutuhan.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2014:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan

pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13)

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan keagamaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan keagamaan sangat baik. Masyarakat *Gampong Lampineung* ikut dalam pembangunan keagamaan seperti pembangunan Meunasah, tempat pengajian dan fasilitas lainnya dilaksanakan dengan dukungan dan keterlibatan langsung dari Masyarakat *Gampong Lampineung*. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perangkat *Gampong Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar* dan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan keagamaan.

Wolcox dalam Totok Mardikanto (2012: 86) mengemukakan 5 tingkatan partisipasi yaitu:

- a. Memberikan informasi (information);
- b. Konsultasi (consultion) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memmmberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- c. Pengambilan keputusan bersama (deciding together), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama (acting together), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan;
- e. Memberikan dukungan (supporting independet community interest) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Edi Suharto (2017: 38) mengartikan Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sosial adalah suatu konsep perubahan sosial terencana yang dirancang untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan untuk melengkapi pembangunan ekonomi Madgley (2015: 25). Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan. Pembangunan sosial tidak hanya terfokus pada kemajuan aspek ekonomi. Konsep ini berasal dari kritik terhadap pembangunan yang terfokus pada kemajuan ekonomi dan tidak memperhatikan aspek sosial.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yang cenderung bervariasi. Tidak semua penduduk hadir dalam forum musyawarah pembangunan (musrembang), dan dari yang hadir, tidak semua aktif memberikan masukan. Faktor-faktor seperti pemahaman terhadap proses perencanaan yang rendah, keterbatasan waktu, dan tingkat keterlibatan yang tidak merata di antara masyarakat menjadi hambatan utama dalam mencapai partisipasi yang optimal..
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di *Gampong Lampineung* Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar menunjukkan tingkat yang

lebih rendah dari harapan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek dan pengumpulan umpan balik, sebagian besar penduduk cenderung bersikap pasif. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini termasuk kurangnya pengetahuan teknis terkait infrastruktur, ketidakpercayaan terhadap proses pembangunan yang berjalan, serta persepsi bahwa kontribusi mereka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir proyek.

3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan keagamaan di Gampong Lampineung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar menunjukkan tingkat yang sangat memuaskan. Pemerintah setempat aktif menggalang partisipasi aktif dari masyarakat melalui perangkat Gampong. Hal ini membuat proses perencanaan dapat dianggap inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat..
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan keagamaan di Gampong Lampineung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sangat baik. Masyarakat aktif terlibat dalam berbagai proyek pembangunan keagamaan seperti Meunasah, tempat pengajian, dan fasilitas lainnya. Partisipasi ini dilakukan dengan dukungan langsung dan keterlibatan aktif dari masyarakat, mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perangkat Gampong Lampineung.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2016). *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2017). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagraindo Persada.
- Djatmiko, Yayat Hayati. (2015). *Perilaku Organisasi*. Bandung : Alfabeta.
- Isbandi, Rukminto Adi. (2017). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press.
- Bintoro, TjokroAmidjojo.(2015). *Perencanaan Pembangunan*, Penerbit PT Gunung Agung
- Edi Suharto. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Refika.
- Hamalik, Adanu. Abimata. Oemar. (2019). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. (2018). *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Lubis,Ibrahi. (2017). *Pengendalian Manajemen Organisasi*. Bandung, Cita Pustaka Media
- Madgley, James. (2015). *Social Developmen: The Developmental Pershepective in Social Walfare*. London: Sage Publications Ltd,
- Moleong, Lexy, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Slamet. Y. (2014). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Thoha Miftah. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Totok, Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Wursanto, Drs. Ig, (2013), *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Andi Offset, Yogyakarta.